

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Republik Kolombia merupakan salah satu negara bekas jajahan Spanyol yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 1810. Namun selama lebih dari 200 tahun pasca kemerdekaan, Kolombia masih terbilang sebagai negara dengan stabilitas demokrasi yang rendah (Alsema, 2014). Berdasarkan pada laporan World Bank yang disadur oleh (www.theglobaleconomy.com, 2008), pada tahun 2008 indeks stabilitas politik di Kolombia berada pada poin (-1.85) per-ambang batas akhir (-2.5) sebagai kategori *weak*; dengan rata-rata perbandingan sebesar (-0.49) diantara negara-negara kawasan regional Amerika Selatan (Uruguay, Chili, Suriname, Argentina, Brazil, Guyana, Bolivia, Paraguay, Ekuador, Peru, dan Venezuela). Sedangkan pada peringkat dunia, Kolombia bahkan berada pada urutan ke-183 dari 195 negara. Indeks stabilitas politik dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan dan mengukur kemungkinan kudeta pemerintah secara *unconstitutional* melalui ada tidaknya tingkat kekerasan atau terorisme yang berpotensi untuk menghancurkan pemerintah (www.theglobaleconomy.com, 2008).

Jika melihat pada dasar pembangunan negara, melalui Amandemen Konstitusi 1991 sebenarnya Kolombia telah menganut prinsip-prinsip bernegara yang baku, dimana dalam *article* 1 disebutkan bahwa Kolombia merupakan *social state* yang berada dibawah aturan hukum dengan menganut prinsip-prinsip kebebasan seperti demokratis, partisipatif, dan pluralistik dalam menghormati hak serta martabat manusia (constituteproject.org, 2017). Namun bagaimana mungkin, prinsip-prinsip kebebasan itu sendiri tidak cukup menciptakan suatu atmosfir yang jauh dari konflik¹ dalam kehidupan bernegara.

Ketidakstabilan sistem demokrasi di Kolombia ini nyatanya dipengaruhi oleh keberadaan kelompok pemberontak FARC-EP (*the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan FARC. Kelompok pemberontak ini sejak tahun

¹ Menurut Ratih Herningtyas dalam penelitiannya, disebutkan bahwa Kolombia merupakan negara demokrasi tertua kedua di *Western Hemisphere* setelah Amerika Serikat, namun konflik dan kekerasan politik yang telah mengakar kuat dan menodai sejarah kemerdekaan Kolombia ini membawa pengaruh yang dalam terhadap dinamika konflik selanjutnya. "*Weak States Sebagai Sebuah Ancaman Keamanan: Studi Kasus Kolombia*". Jurnal Hubungan Internasional UMY Vol.5 No.1 ed.April 2012.

1960-an² keberadaannya sudah sangat terkenal di Kolombia. FARC yang pada awalnya merupakan sebuah perkumpulan gerakan petani pedesaan, kemudian bertransformasi menjadi kelompok bersenjata sayap kiri dibawah Colombian Communist Party (PCC). Tujuan awal dibentuknya FARC yaitu untuk menghapus '*Colombia's systemic social inequality*' atau ketidakadilan sosial sistemik yang terjadi di Kolombia (Beittel, 2015, pp.1-4).

Pada perkembangannya, FARC kini justru telah bertransformasi menjadi kelompok pemberontak yang memanfaatkan tindakan kriminal seperti transaksi gelap kokain sebagai salah satu sumber pendanaan bagi aktifitasnya dalam memperoleh kekuasaan di beberapa wilayah di Kolombia. Hal ini juga diikuti dengan semakin maraknya tindakan-tindakan kejahatan seperti '*non-combatant killings, kidnappings, forced displacements, landmine casualties, child combatants, and other acts that left behind a large number of victims*' (Isacson, 2014). Sehingga situasi ini menempatkan Kolombia sebagai negara yang rentan terhadap berbagai macam risiko. Menurut laporan Credendo Group yang disadur oleh (www.theglobaleconomy.com, 2014), tingkat risiko terhadap perang atau *war-risk* di Kolombia tergolong dalam poin indikator (4): *middle* dengan batas poin (1): *low* dan (7): *high*; dimana pada peringkat dunia Kolombia berada pada ranking 52 negara yang paling rentan, dari total survey di 200 negara.

Selain itu, kerugian lain dapat dilihat melalui laporan UNHCR tentang '*The State of the World's Refugee, Chapter 7: Internally Displace Persons*'. Kolombia disebut sebagai salah satu negara yang menduduki tingkat '*internally displaced people*' (orang-orang yang kehilangan tempat tinggal) tertinggi kedua setelah Sudan dalam kurun waktu tahun 2000an. Sebanyak 2.000.000 hingga 3.000.000 orang kehilangan tempat tinggalnya akibat konflik internal dengan kelompok pemberontak yang berkepanjangan di Kolombia. Pada tahun 1990 saja konflik bersenjata di Kolombia telah memakan korban jiwa sebanyak lebih dari 40.000 orang, kebanyakan diantaranya yaitu masyarakat sipil Kolombia (www.unhcr.org, 2005).

² Menurut June S. Biettel pada penelitiannya disebutkan bahwa sejak tahun 1960-an kelompok-kelompok pemberontak di Kolombia telah melakukan serangan terorisme, perusakan dan penghancuran infrastruktur negara, dan terlibat dalam penculikan dan pemerasan serta tindakan kriminal lainnya. "*Peace Talks in Colombia*". Congressional Research Service (CRS Report). March 31,2015. www.crs.gov.

Pemerintah Kolombia sendiri sebelumnya telah melakukan berbagai upaya perundingan damai dengan sejumlah kelompok pemberontak sejak tahun 1980-an. Namun upaya tersebut selalu mengalami kegagalan, June S. Beittel dalam *“Peace Talks in Colombia”* menjelaskan bahwa hal ini terjadi sebab (1) proses integrasi kelompok pemberontak kedalam demokrasi politik di Kolombia terbilang tidak pasti dan membutuhkan jaminan yang lebih efektif; 2) kondisi kekuatan FARC yang pada saat itu sedang berada di puncaknya menjadi kesulitan tersendiri bagi Pemerintah Kolombia untuk mencapai proses negosiasi (Beittel, 2015). Selain itu pada kasus kelompok pemberontak FARC, ditemukan adanya pelanggaran kesepakatan berupa penyalahgunaan zona demiliterisasi ‘demilitarized zone’ (DMZ) pada wilayah Caguan. Wilayah ini juga diketahui merupakan salah satu kamp pertahanan FARC, kelompok ini berusaha kembali membentuk pasukan militer, melancarkan serangan kekerasan, bahkan mengembangkan lahan pertanian koka dalam skala besar, serta melakukan penyanderaan terhadap warga sipil.

Meskipun memperoleh dukungan dari masyarakat, namun upaya-upaya pada pemerintahan sebelumnya yang cenderung lebih menekankan pada pendekatan *hardline approach* dengan penggunaan militer justru dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Hingga pada tahun 2010 dimana Juan Manuel Santos yang merupakan mantan Menteri Pertahanan (2004-2008), terpilih sebagai Presiden Kolombia dan sejak dilantik Santos menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan konflik dengan kelompok FARC.

Melalui kegagalan tersebut, Santos mendapatkan pembelajaran dalam menentukan pola pendekatan yang lebih baik dengan pihak oposisi. Santos merupakan satu-satunya presiden yang mampu mencapai meja perundingan hingga sejauh sekarang ini. Sejak terpilihnya Santos sebagai Presiden Kolombia, ia selalu menunjukkan sikap yang berbeda dalam menanggapi konflik. Hal ini terbukti dengan caranya berpikir dalam memberikan solusi perubahan bagi perdamaian di Kolombia, ia selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama. Melalui pertimbangan kegagalan di masa lalu, Santos masih terus mengupayakan proses perdamaian dengan FARC dengan mengacu pada *‘the triangle of lesson learnt from previous peace processes’* yang mencakup, 1) Perundingan harus dilakukan diluar wilayah Kolombia; 2) Gencatan senjata hanya akan dilakukan selama implementasi di akhir perjanjian; 3) Pelaksanaan negosiasi harus dibatasi dengan lima poin agenda (pembangunan agraria, partisipasi politik, mengakhiri konflik, perdagangan narkoba, dan pemenuhan hak-hak korban).

Dengan metode pendekatan yang berbeda, Santos berhasil mengajak FARC untuk duduk bersama membahas terkait perdamaian Kolombia. Pada tahun 2012, Santos secara resmi mendeklarasikan upaya perundingan damai dengan pihak FARC yang telah melalui proses diskusi tertutup di Oslo, Norwegia dan Havana, Kuba pada tahun 2010. Konflik antara pemerintah dengan FARC, pada dasarnya bukanlah perkara yang mudah untuk diselesaikan. Melalui wawancaranya dengan CFR (*Council on Foreign Relations*) 22/09/14, Santos menyebutkan keyakinannya terkait keberhasilan kesepakatan pada perundingan damai. Meskipun hal tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, dalam pernyataannya tersebut ia menekankan bahwa tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan tanggung jawabnya sebagai presiden. Selain itu ia juga meyakinkan masyarakat Kolombia bahwa Perundingan Damai kali ini adalah salah satu negosiasi dan cara terbaik yang dapat diterima sebagai suatu usaha untuk melindungi keamanan seluruh rakyat (www.cfr.org, 2014).

Kemudian berkaitan dengan bagaimana konflik tersebut nantinya dapat terselesaikan, maka digunakan analisis pada level individu yaitu dengan menempatkan pemimpin sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan. Keputusan-keputusan politik yang dipilih oleh pemimpin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang muncul dari (E) *the environment which surround him*; dan (P) *the person itself*, dimana hal ini dapat dijelaskan melalui *Developing Political Personality Profiles*, yang dikembangkan oleh Jerrold M. Post, dan merupakan pendekatan dari pengembangan teori di dalam psikologi politik. Studi terkait pemimpin ini dapat menunjukkan arah kebijakan suatu negara, yang mana dalam hal ini perundingan damai yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dibawah masa kepemimpinan Juan Manuel Santos adalah kebijakan dalam negeri yang dipengaruhi oleh aktor non-negara yaitu FARC.

Selain itu, pada pendekatan ini, kebijakan perundingan damai (*Peace Talk Agreement*) nantinya dipahami sebagai *political behavior* Santos yang dihasilkan dari lima macam elemen faktor pendorong (*historical background; social environment; the person; immediate situation; dan political behavior as outcome*). Analisis menggunakan pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mendorong terbentuknya kepribadian seseorang.

1.1.1. Kajian Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian, maka dalam hal ini penulis mencoba mengutip beberapa penelitian sebelumnya, untuk dijadikan bahan perbandingan dan referensi penelitian. Berikut penelitian lain yang membahas mengenai studi berbasis karakter pada level individu khususnya yang berkaitan dengan Presiden Kolombia,

Penelitian pertama, ditulis oleh Jose Manuel Rivas Otero, “*Leading the war, leading to peace. Leadership styles in Colombia (1982-2014)*” dalam Jurnal Pensamiento Americano, 2016. Pada tulisan Jose Manuel fokus penelitian terletak pada penilaian terhadap gaya kepemimpinan aktor pembuat kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan konflik bersenjata di Kolombia (1982-2014). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *Leadership Traits Analysis* (LTA). Tujuannya untuk membuktikan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap pembuatan keputusan politik pada keadaan konflik, terutama dalam perang dan perdamaian politik (Otero, 2016, p. 32).

Perbandingan gaya kepemimpinan pemimpin politik di analisis melalui kategorisasi 1) *Degree of openness to information flow*; dan 2) *Motivation*; dengan memperhatikan penggunaan analisa konten pada Bahasa atau linguistik yang digunakan baik secara verbal maupun non-verbal. Hasil yang didapatkan khususnya pada Juan Manuel Santos, jika dibandingkan dengan pemimpin lainnya (Belisario Betancur, Virgilio Barco, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andres Pastrana, dan Alvaro Uribe); Santos memiliki kecenderungan gaya kepemimpinan *Self-confidence* dan *Problem Solving*.

Selanjutnya pada penelitian kedua, Juliana Tappe Ortiz, “*Political Leadership Traits in Peace Process: Nelson Mandela & Manuel Santos*” (2017). Membahas mengenai pengaruh sifat kepemimpinan dan psikologi politik yang dianggap penting bagi studi konflik dan perdamaian. Penelitian ini juga membahas mengenai dampak dari sifat kepemimpinan tersebut terhadap proses perdamaian. Pada penelitian ini Ortiz menggunakan studi perbandingan komparatif pada konflik dan perdamaian, yang direpresentasikan melalui aktor politik seperti Nelson Mandela dan Juan Manuel Santos (Ortiz, 2017, pp. 1-4).

Untuk menjawab mengenai fokus pembahasan tersebut, Ortiz menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan kode operasional (mengungkap minat dan pilihan individu dalam

memperoleh tujuan politik; dan pandangan pribadinya mengenai dasar alamiah sistem politik), serta teknik *Leadership Traits Analysis* (LTA) (bertujuan untuk mengidentifikasi tujuh macam sifat kepemimpinan) (Ortiz, 2017, pp. 17-21). Hasil yang didapatkan adalah, pendekatan kode operasional tidak terlalu efektif dalam menjelaskan sifat-sifat kepemimpinan Mandela dan Santos. Tetapi hal tersebut justru terjawab melalui analisis teknik LTA dimana Mandela memiliki penilaian di atas rata-rata terkait dengan (*belief to be able to control events; conceptual complexity; dan distrust of others*). Sehingga H1 terbukti menunjukkan bahwa Mandela memiliki sifat kepemimpinan yang berbeda dengan pemimpin lainnya.

Melalui teknik LTA Santos diketahui memiliki penilaian tinggi pada kategori *the need for power and influence* yang menunjukkan bahwa Santos berkemampuan untuk memiliki kontrol terhadap lingkungannya dalam membangun kekuatan. Menurut (Hermann, 1999:16 dalam (Ortiz, 2017, p. 33) pemimpin dengan sifat ini cenderung dapat menerka situasi dan mengetahui taktik yang harus digunakan untuk mencapai tujuannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka didapat rumusan masalah,
Bagaimana karakteristik personal Presiden Juan Manuel Santos berpengaruh terhadap *Peace Talk Agreement* (PTA) tahun 2012-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

- Tujuan Umum:

Mengetahui faktor-faktor yang mendasari diberlakukannya Peace Talks Agreement antara Pemerintah Kolombia dengan FARC serta berlangsungnya proses perdamaian tersebut.

- Tujuan Khusus:

- a) Mengetahui aktor pembuat kebijakan yang mendorong terciptanya penyelesaian konflik dan perdamaian di Kolombia melalui Peace Talks Agreement dengan FARC

- b) Menganalisis pengaruh karakteristik personal pemimpin negara sebagai aktor pembuat kebijakan dalam menciptakan perdamaian di Kolombia.

1.4. Manfaat Penelitian

- Manfaat Akademis:

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan akademik didalam bidang ilmu hubungan internasional terkait dengan deskripsi faktor pendorong berlakunya kebijakan *Peace Talks Agreement* di Kolombia beserta pengaruh karakteristik personal pemimpin negara terhadap pembuatan keputusan kebijakan tersebut. Dalam hal ini studi kasus di analisis melalui pendekatan psikologi politik yang dikaitkan dengan proses penyelesaian konflik dan perdamaian dengan kelompok pemberontak FARC dengan Pemerintah Kolombia.

- Manfaat Praktis:

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian terkait di kemudian hari.

1.5. Kerangka Pemikiran

Beradsarkan rumusan masalah terkait dengan pengaruh karakteristik personal pemimpin negara yang dalam hal ini adalah Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, sebagai pembuat kebijakan pada proses perundingan damai atau *Peace Talks Agreement* (PTA) dengan kelompok pemberontak FARC. Maka acuan dalam penulisan akan didasarkan pada sejumlah teori ataupun konsep yang dapat menjelaskan relevansi pengaruh karakteristik personal terhadap *outcome* yang dihasilkan oleh pemimpin dengan penjabaran sebagai berikut,

1.5.1. *Developing Political Personality Profile*

Meminjam konsep peranan '*leader*' dalam analisis kebijakan luar negeri, Charles W. Kegley & Wittkopf (1993:56) menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh elit politik dapat menentukan alur sejarah. Sebab para pemimpin beserta jenis kepemimpinan yang dimilikinya membentuk arah kebijakan luar negeri yang dibuat, berikut perilaku negara-bangsa tersebut di dalam kancah politik dunia. Kegley & Wittkopf berasumsi dengan melihat pemimpin sebagai '*Makers and Movers of World History*' dimana tindakan yang diambil oleh pemimpin dalam pembuatan kebijakan merupakan inisiatif dan pilihan yang telah ditentukan oleh negara. Kebijakan yang ada seringkali dikaitkan dengan siapa pemimpin yang bertanggung jawab pada

saat itu, sehingga keberhasilan ataupun kegagalan dalam membangun hubungan luar negeri menjadi ciri yang melekat pada suatu bangsa dan tercermin dari pemimpin itu sendiri (Charles W. Kegley & Wittkopf, 1993, p. 56)

Analisis Psikologi Politik seringkali digunakan oleh studi hubungan internasional dalam membahas fenomena politik³ pada analisis level individu, sebab perspektif ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana sikap individu yang terlibat dapat terbentuk, dan bagaimana mereka membuat keputusan serta bertindak atas keputusan tersebut melalui proses pemahaman mendalam terhadap individu itu sendiri. (Erisen, 2012, p. 9) menyebutkan bahwa “*Political psychology is neither just psychology nor just political, science; instead, it is at the most general level an application of what is known about human psychology to the study of politics.*” Sehingga dalam hal ini pemahaman terkait psikologi manusia digunakan untuk mempelajari proses pembentukan *political attitudes; decisions; dan political behaviour* yang berimplikasi terhadap fenomena politik. Psikologi politik juga berusaha memahami pola pemikiran manusia, yang berasal dan dipengaruhi dari sejarah individu; dan kondisi politik saat itu (Erisen, 2012, pp. 10-11). Hal tersebut mengarahkan pada bagaimana proses pemikiran di dalam individu dapat terbentuk, dan menghasilkan *output* sebagai sebuah respon atas situasi politik yang terjadi saat itu ataupun prediksi di masa yang akan datang.

Melalui pendekatan ‘*Developing Political Personality Profile*’ yang dikembangkan oleh Jerrold M. Post. Pada penelitiannya Post berfokus pada profil seorang pemimpin beserta dinamikanya, yaitu hal apa saja yang dapat membangun asumsi dasar pemikiran seorang pemimpin serta implikasinya sebagai landasan dalam *political decision-making*. Analisis Post yang berfokus pada pemimpin atau *leader in context* berawal dari pemikiran M. Brewster Smith:1968 dalam Post:2003 yang menyebutkan bahwa

³ Dalam artikel tulisan Elif Erisen, “*An Introduction to Political Psychology for International Relations Scholars*”. PERCEPTIONS: vol. XVII, no.3 (pp.9-28). 2012. Fenomena politik yang dimaksud mengacu pada studi hubungan internasional seputar analisis kebijakan luar negeri dan pembuatan keputusan atau kebijakan; konflik internasional; serta resolusi konflik, dimana penggunaan perspektif psikologi politik sangat bermanfaat untuk memahami proses yang terjadi di dalamnya.

“The leader can be envisaged as residing within a series of fields, the cultural, historical, and political context of his country, the specific aspects of leader’s background, which shaped the individual, and the nature of the current political situation.”

(Post, 2003, p. 71)

Maksud yang ingin disampaikan oleh Smith adalah, dalam memandang pemimpin aspek-aspek seperti budaya, politik, dan sejarah menjadi penting untuk dipertimbangkan sebab pemimpin itu sendiri merupakan bagian dari negara. Aspek-aspek tersebut membantu membentuk latar belakang seorang pemimpin, yang selanjutnya hal tersebut akan berimplikasi terhadap pembentukan dan perkembangan individu yang bersangkutan dengan situasi politik di beberapa waktu terakhir.

Sederhananya, manusia merupakan bagian dari masyarakat sosial dimana keduanya hidup bersama-sama dalam suatu lingkungan, kondisi ini dikenal dengan sebutan *‘the life space’* atau ruang kehidupan. Untuk mengetahui alasan dibalik seseorang berperilaku tertentu, pemahaman terkait *life space* ini menjelaskan bahwa lingkungan merupakan faktor pendorong eksternal yang mempengaruhi perilaku, yang mana dihasilkan dari proses interaksi seseorang dengan orang lain, isu-isu politik, asal-muasal dan tempat tinggal, tempat kerja, dan hal apapun yang mengitari hidupnya. Dengan begitu, perilaku pemimpin dapat dipahami sebagai suatu aksi-reaksi terhadap lingkungan dan situasi tertentu sebagaimana yang dijelaskan oleh Kurt Lewin:1951 dalam Stone & Schaffner:1988 seperti berikut

“the term life space refer to the totality of forces acting on the person at a given moment in time.

...inside the life space, there are includes all of the factors of forces affecting the individual at a given moment which consist of (P) the person, with all of his unique attributes; and (E) the environment. It is called the ‘principle of contemporaneity’ which say that, at the time person acts, his/her behaviour is the product of forces acting at that moment in time.”

(Stone & Schaffner, 1988, pp. 30-31)

Dari hal tersebut, *behaviour* atau perilaku diketahui sebagai produk dari dorongan suatu tindakan yang terjadi pada suatu waktu, dimana untuk mengetahui pilihan seseorang dalam mengambil tindakan atau caranya berperilaku sebagai respon terhadap situasi tertentu perlu melihat pada faktor-faktor pendorong yang melatar belakangi tindakannya. Hal ini diperoleh dari (P) *the person himself*, dan (E) *the environment which surround him* dimana keduanya sama-sama dianggap penting dalam menunjukkan proses pembentukan diri seseorang.

Five elements to understanding leader's behaviour

Penjelasan diatas membentuk pemahaman yang dapat membantu memetakan faktor-faktor pendorong untuk memperdalam analisis psikologi politik terkait perilaku seorang pemimpin. Stone & Schaffner:1988 menambahkan lima macam elemen pendukung yang dikembangkan dari latar belakang yang muncul dalam (P) *the person himself*, dan (E) *the environment which surround him* sebagai berikut

1. The Historical Background

Aspek latar belakang sejarah beserta dinamika perubahan yang terjadi di negara yang ditinggalinya, lingkungan tetangga, dan sistem ekonomi-politik berperan dalam membentuk budaya dimana seseorang itu tumbuh dan dibesarkan.

2. The Social Environment

Aspek lingkungan yang terjadi di masa lalu dan sekarang, yang didalamnya terdapat nilai budaya yang dianggap dapat membentuk karakter seseorang; serta membentuk pengetahuan/ kesadarannya terhadap dunia sosial-politik yang dijalaninya. *Social environment* juga membentuk *phenomenological situation*⁴ bagi seorang pemimpin.

3. The Person

Segala hal yang muncul dari dalam diri seseorang, seperti karakter, *attitude*, emosi, *consciousness* atau kesadaran diri yang mana secara keseluruhan hal-hal tersebut dapat membentuk kepribadian seseorang.

4. The Immediate Situation

Faktor situasi (khususnya kondisi politik beberapa waktu terakhir) sebagai pendorong terbentuknya perilaku seseorang, yang dampaknya harus dibedakan antara situasi yang dipengaruhi oleh psikologi seseorang; dengan situasi yang secara fisik dan kasat mata memang terjadi saat itu. *Immediate situation* nantinya akan membentuk latar belakang relevansi tindakan politik seorang individu.

5. Political Behaviour

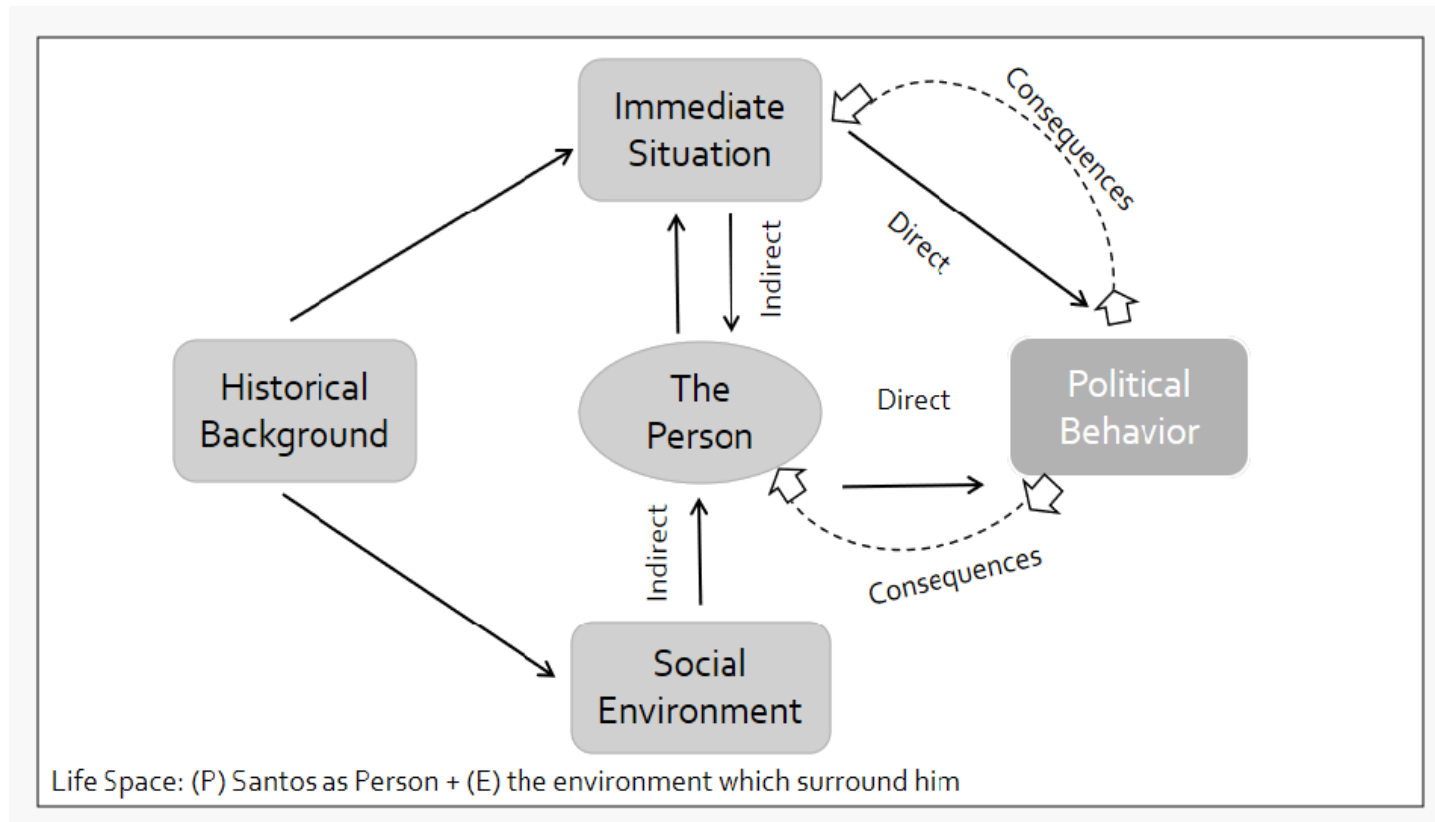
Segala macam tindakan, pilihan, atau interaksi diantara seseorang atau kelompok yang memiliki maksud politik yang menarik atau dianggap penting. *Political behaviour* juga dapat dipelajari sebagai pola-pola yang menghubungkan kejadian politik dengan tindakan pemimpin yang secara psikologi dianggap menarik.

(Stone & Schaffner, 1988, pp. 35-38)

⁴ *Phenomenological situation* yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana seseorang memandang dan menerima situasi sosial yang terjadi di sekitarnya. Nilai-nilai budaya yang berkembang didalam dirinya karena faktor pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan pekerjaan memaksa seseorang untuk bertindak sesuai dengan kapasitasnya. Kondisi ini membuatnya menyadari peran yang sedang ia jalankan di dalam masyarakat, dan bagaimana seharusnya ia bertindak dalam kapasitas peran tersebut.

Penjelasan terkait *Developing Political Personality Profile* beserta elemen faktor pendorong dalam perkembangan kepribadian seseorang dapat digambarkan melalui gambar skema berikut,

Skema 1.1: Alur Perkembangan Kepribadian Individu



Sumber: diolah dari berbagai sumber

1.6. Hipotesis

Keputusan pemimpin negara dalam pembuatan kebijakan adalah serangkaian proses yang dilatar belakangi oleh sejumlah faktor pendorong (*historical background, social environment, the person, immediate situation*) yang muncul dari (P) *the person himself*, dan (E) *the environment which surround him*, untuk menggambarkan *life-space* atau ruang kehidupannya.

Hipotesis yang dapat menjawab rumusan masalah yaitu, melalui *Developing political personality profiles* didapat kesimpulan bahwa, *political behaviour* adalah perilaku yang muncul sebagai respon Santos terhadap situasi politik negara yang terjadi saat ia terpilih menjadi presiden. PTA merupakan respon dan solusi Santos atas situasi konflik berkepanjangan, dengan begitu PTA juga berarti sebagai *political behaviour* yang dihasilkan dari pengaruh faktor-faktor pembentuk kepribadian. Sehingga pengaruh karakteristik personal Presiden Santos dapat dilihat melalui proses perkembangan kepribadiannya.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. *Peace Talks Agreement* (PTA)

Peace Talks Agreement (PTA) atau Perundingan Damai dalam hal ini adalah suatu kegiatan dan upaya yang dilakukan sebagai bagian dari negosiasi konflik. Usaha ini biasanya dilakukan oleh salah satu pihak yang berseteru, yang mulai menyadari pentingnya penggunaan pendekatan dengan cara damai dalam memperoleh kepentingan bersama bagi kedua belah pihak.

June S. Beittel (2015) menjelaskan bahwa PTA yang dilakukan oleh Pemerintah Kolombia dimulai pada tahun 2012 dan diawali oleh Presiden Juan Manuel Santos atas keinginannya untuk menciptakan perdamaian di Kolombia. Hal tersebut dibuktikan melalui pengumuman yang diselenggarakan dibawah tanggung jawab Presiden Santos, dalam pernyataannya disebutkan bahwa, presiden berjanji untuk 1) tidak akan mengulang kembali kesalahan pada proses negosiasi sebelumnya; 2) tujuan dari PTA adalah untuk mengakhiri konflik; 3) pasukan militer Kolombia tidak akan menyerahkan wilayah manapun sebagai wilayah DMZ (*demilitarised zone*) ataupun mengembalikan operasinya untuk melawan kelompok bersenjata ilegal (Beittel, 2015, hal. 14).

Michelle Maiese (2003) menjelaskan bahwa ketika kedua belah pihak bernegosiasi, biasanya mereka mengharapkan suatu kondisi yang disebut dengan '*take and give*' yaitu dimana kedua belah pihak atau lebih dapat saling memperoleh tujuannya masing-masing. Kemudian R.J. Lewicki dalam (Maiese, 2003) menggambarkan situasi tersebut sebagai suatu ketergantungan atau

'*interdependence*' antar kedua belah pihak. Struktur dari '*interdependence*' antara kedua belah pihak yang bernegosiasi akan menentukan berbagai macam peluang yang mungkin dapat dihasilkan dalam negosiasi tersebut, Lewicki mencontohkan dengan kondisi yang disebut '*win-lose situation*': pihak yang menang di satu sisi akan memperoleh keuntungan yang lebih; dan '*win-win situation*': munculnya solusi bagi kedua pihak, sehingga negosiasi berjalan dengan lancar dan setiap pihak memperoleh berhasil kepentingannya masing-masing.

Berkaitan dalam penjelasan diatas, situasi yang terjadi di Kolombia selama proses negosiasi melalui PTA dilakukan sesuai dengan keputusan presiden yaitu negosiasi diambil alih oleh pemerintah dengan sudut pandang '*winning not-winner party*' (Machado, 2016), sehingga dalam hal ini Pemerintah Kolombia memilih untuk memposisikan pihaknya pada situasi '*win-win situation*' dimana pemerintah bersedia untuk memberikan keuntungan kepada pihak oposisi dengan syarat-syarat serta ketentuan yang berlaku dan tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

1.7.1.2. Developing Political Personality Profile

Pendekatan '*Developing Political Personality Profile*' yang dikembangkan oleh Jerrold M. Post. berfokus pada profil seorang pemimpin beserta dinamikanya, yaitu hal apa saja yang dapat membangun asumsi dasar pemikiran seorang pemimpin serta implikasinya sebagai landasan dalam *political decision-making*. Analisis Post yang berfokus pada pemimpin atau *leader in context*. Yang dimaksud adalah, dalam memandang seorang pemimpin aspek-aspek seperti budaya, politik, dan sejarah menjadi penting untuk dipertimbangkan sebab pemimpin itu sendiri merupakan bagian dari negara. Aspek-aspek tersebut membantu membentuk latar belakang seorang pemimpin, yang selanjutnya hal tersebut akan berimplikasi terhadap pembentukan dan perkembangan individu yang bersangkutan dengan situasi politik di beberapa waktu terakhir (*current political event*).

Manusia merupakan bagian dari masyarakat sosial, keduanya hidup bersama-sama dalam suatu lingkungan, kondisi ini dikenal dengan sebutan '*the life space*' atau ruang kehidupan. Menjelaskan bahwa, lingkungan merupakan faktor pendorong eksternal yang mempengaruhi perilaku, yang mana dihasilkan dari proses interaksi seseorang dengan orang lain, isu-isu politik, asal-muasal dan tempat tinggal, tempat kerja, dan hal apapun yang mengitari hidupnya. Dengan

begitu, perilaku pemimpin dapat dipahami sebagai suatu aksi-reaksi terhadap lingkungan dan situasi tertentu.

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. *Peace Talk Agreement (PTA)*

- Upaya negosiasi konflik
- Salah satu pihak yang memulai karena menyadari pentingnya perdamaian
- Mencapai kepentingan bersama dengan cara damai
- Mengusahakan tidak adanya pihak yang dirugikan
- *Win-win solution*
- *Winning not winner party*

1.7.2.2. *Developing Political Personality Profile*

- Dinamika profil pemimpin
- Asumsi dasar pemikiran seorang pemimpin dipengaruhi oleh lingkungan
- Lingkungan membentuk situasi politik
- Lingkungan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku

1.7.3. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan penjelasan hubungan atau korelasi sebab-akibat dari suatu peristiwa, khususnya yang berfokus pada proses perundingan damai di Kolombia sebagai suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor pembentuk kepribadian. Bentuk penelitian eksplanatif dipilih untuk menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif.

Pada penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana proses terbentuknya kebijakan PTA (yang merupakan refleksi dari *political behavior* Santos), dapat menggambarkan pengaruh karakteristik personal Santos terhadap situasi konflik berkepanjangan yang terjadi di Kolombia. Keputusan Santos untuk menyelenggarakan PTA adalah solusi yang ia tawarkan untuk menciptakan perubahan dan perdamaian di Kolombia.

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan PTA sebagai *political behaviour* Presiden Santos yang muncul sebagai respon atas konflik berkepanjangan yang masih belum terselesaikan sejak dilantikannya Santos sebagai presiden pada tahun 2010. Pembahasan terkait perkembangan kesepakatan dalam PTA sendiri secara resmi dimulai sejak tahun 2012 hingga 2016, dengan hasil kesepakatan implementasi penyelesaian pada lima poin permasalahan. Secara lebih spesifik penelitian ini membatasi analisis pada level individu, dimana Presiden Santos adalah subjek utama yang digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan kebijakan, yang dipengaruhi oleh faktor pembentuk kepribadiannya sebagai karakteristik personal.

Sementara itu, secara ruang lingkup penelitian ini mengambil wilayah studi kasus di Kolombia yang mana pemerintah secara internal berpegang pada prinsip kedaulatan nasional untuk menyelenggarakan perundingan damai, meskipun tetap melibatkan pihak-pihak diluar *state-actor* (NGO terkait ahli di bidang konflik dan perdamaian) dan bantuan negara sahabat.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berasal dari data-data sekunder yang diperoleh melalui informasi dari internet (artikel, berita nasional-internasional, video dan pidato), jurnal ilmiah, buku bacaan, *e-book*, dokumentasi media, serta sejarah hidup atau otobiografi yang di dapatkan melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. **Kajian pustaka** atau studi pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber pustaka terkait yang dapat membantu penulis dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kajian pustaka yang dilakukan penulis diperoleh melalui sumber-sumber seperti, buku teks, artikel, jurnal, *e-book*, laporan serta website resmi dari institusi dan organisasi terkait.
- b. **Dokumentasi**, yaitu pengumpulan dokumentasi berupa data, fakta, otobiografi, dan berita terkait dengan isu yang akan dibahas penulis pada penelitian ini sebagai bukti pelengkap yang bertujuan untuk memperkaya data dan informasi.

1.7.6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian yang dilakukan setelah peneliti berhasil mengumpulkan data-data yang telah disebutkan diatas yang berkaitan dengan

penelitian penulis. Analisis data sendiri didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh (Moleong, 2011).

Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data diawali dengan:

- Menelaah seluruh data-data terkait,
- Reduksi data melalui abstraksi,
- Penyusunan menjadi satuan-satuan terpisah,
- Kategorisasi satuan dan koding,
- Mengadakan pemeriksaan keabsahan data dan penafsiran data

(Moleong, 2011)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik. Data yang terdapat pada penelitian kualitatif bersifat tersirat yang ada dan terkandung dalam sumber data itu sendiri, sehingga penulis akan mencoba menganalisis sumber data yang terkumpul dengan menggunakan teori terkait untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan pada rumusan masalah. Melalui metode perbandingan tetap, proses analisis data meliputi a) reduksi data: identifikasi satuan unit dan koding; b) kategorisasi data: menyusun dan memilah kategori kedalam bagian yang memiliki kesamaan; c) sintesisasi: mencari kaitan antara satu kategori dengan yang lainnya (Moleong, 2011).

1.7.7. Sistematika Penulisan

Bab I:

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti. Pada bagian ini juga ditulis mengenai rumusan masalah yang akan dibahas, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisa penelitian, definisi konseptual dan operasional, serta metodologi penelitian (tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data) yang digunakan untuk meneliti masalah yang dimaksud.

Bab II:

Pada Bab ini akan dibahas mengenai *“Sejarah, Perkembangan, serta Dampak dari Konflik Antara Pemerintah Kolombia dengan Kelompok Pemberontak FARC”*. Penjelasan terkait sejarah dan perkembangan konflik di Kolombia yang diakibatkan oleh kesenjangan

ekonomi, politik, sosial-budaya mendorong pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok FARC. Berikut dampak-dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari konflik berkepanjangan tersebut.

Bab III:

Dalam Bab ini “*Analisis Pendekatan Developing Political Personality Profile Terhadap Presiden Juan Manuel Santos pada Peace Talk Agreement (PTA) dengan FARC (2012-2016)*” akan dibahas mengenai faktor-faktor pendorong yang melatar belakangi keputusan Presiden Juan Manuel Santos untuk menyelenggarakan PTA. Dimana perbedaan upaya PTA yang dilakukan dapat menunjukkan pengaruh karakteristik personalnya. Penelitian akan difokuskan pada periode tahun 2012 hingga 2016, sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan PTA di Kolombia. Analisis mengenai faktor-faktor pendorong pembuatan kebijakan akan dilakukan menggunakan kerangka pemikiran dengan pendekatan ‘*Developing Political Personality Profile*’ yang terinspirasi dari William F. Stone & Paul E. Schaffner, dan dikembangkan oleh Jerrold M. Post dalam teori psikologi politik.

Bab IV:

Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.